

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS WEBSITE E-MUSRENBANG**

(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo
Kota Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

CHALVIN ALIF BASKORO

NIM : I71216057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
2020**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Chalvin Alif Baskoro

NIM : I71216057

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang
(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan
Benowo Kota Surabaya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 Juni 2020



Yang Menyatakan

Chalvin Alif Baskoro
NIM : I71216057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Chalvin Alif Baskoro

NIM : I71216057

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 23 Juli 2020

Pembimbing



Zimamul Khaq, S.Pd, M. Si

NIP : 198212022015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Chalvin Alif Baskoro dengan judul PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WEBSITE E-MUSRENBANG (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020

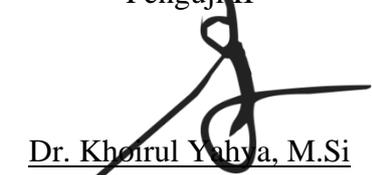
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Zimamul Khaq, M.Si
NIP 198212022015031002

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP 197202062007101003

Penguji III



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP 196909071994032001

Penguji IV



M. Ilyas Rolis, M.Si
NIP 197704182011011007

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHALVIN ALIF BASKORO
 NIM : I71216057
 Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
 E-mail address : chalvinalifbaskoro@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

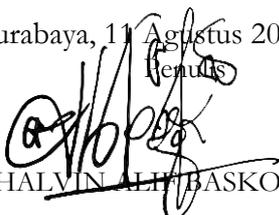
**Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website
 E-Musrenbang
 (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota
 Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Penulis

 (CHALVIN ALIF BASKORO)

ABSTRAKSI

Chalvin Alif Baskoro, 2020, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, e-Musrenbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, (2) mengetahui dan memahami bagaimana dampak dengan diberlakukannya e-musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tangga Partisipasi yang dikenal dengan *A Ladder of Participation* yang digagas oleh Sherry R Arnstein.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari berada pada tangga *delegated of power* atau pendelegasian kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan adanya ruang khusus bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, melainkan sebagai mitra pemerintah. Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan yang sedang dihadapi saat ini. Program-program yang ada saat ini merupakan apa yang mereka usulkan pada saat tahapan proses perencanaan pembangunan berlangsung.

Keberadaan e-Musrenbang sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kota Surabaya telah membawa dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah usulan program pembangunan. Meski begitu, masih terdapat warga yang belum mengetahui kegunaan e-Musrenbang sebagai salah satu sistem perencanaan pembangunan.

| | | |
|--|---|------------|
| C. | Pemilihan Informan dan Objek Penelitian | 47 |
| 1. | Informan Penelitian | 47 |
| 2. | Teknik Penentuan Informan | 47 |
| 3. | Objek Penelitian | 49 |
| D. | Tahap – Tahap Penelitian | 49 |
| 1. | Pemilihan dan Analisis Masalah yang akan Diteliti..... | 49 |
| 2. | Penentuan Metodologi Penelitian | 50 |
| 3. | Pengumpulan Data | 51 |
| 4. | Pengelolaan, Analisis dan Intrepretasi Data | 52 |
| 5. | Penyusunan Laporan Penelitian | 52 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| 1. | Observasi | 53 |
| 2. | Wawancara | 54 |
| 3. | Dokumentasi | 55 |
| F. | Teknik Analisis Data | 55 |
| 1. | Reduksi Data | 56 |
| 2. | Penyajian Data | 56 |
| 3. | Verifikasi | 57 |
| G. | Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data | 58 |
| 1. | Meningkatkan Ketekunan | 58 |
| 2. | Triangulasi | 58 |
| 3. | Sistematika Pembahasan | 59 |
| BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN | | 61 |
| A. | Setting Lokasi Penelitian | 61 |
| B. | Profil Organisasi | 66 |
| 1. | Kelurahan Romokalisari | 66 |
| 2. | BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya | 67 |
| C. | Penyajian Data | 68 |
| 1. | Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo | 68 |
| 2. | Kurang Sadarnya Masyarakat Terhadap Kegunaan Website E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan | 80 |
| 3. | Tata Cara Pelaksanaan E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari | 82 |
| 4. | Dampak Penggunaan E-Musrenbang Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo | 92 |
| D. | Analisis Data | 96 |
| | Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari | 96 |
| BAB V PENUTUP | | 104 |
| A. | Simpulan | 104 |

Menurut Arnstein dalam teorinya tentang tangga partisipasi atau *A ladder of participation* yang membagi partisipasi kebeberapa tingkatan, hal tersebut terbagi dalam berbagai kategori sejauh mana warga dilibatkan dan diberi ruang dalam proses penentuan kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah sehingga dampak dari program dan kebijakan dapat langsung dirasakan oleh warganya. Walaupun usulan yang diberikan bersumber dari tingkat RW dan Kelurahan, tetapi tetap saja yang melakukan validasi keputusan ialah pada tiga tahapan selanjutnya yakni pemerintah kecamatan, SKPD, Pemerintah Kota dan Legislatif. Atau dengan kata lain, adanya indikasi bahwa banyak usulan dari level kelurahan yang tidak di validasi, walaupun usulan program tersebut adalah hal yang dibutuhkan bagi masyarakat.

Romokalisari adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Kecamatan Benowo mempunyai luas $\pm 23,76$ km² dan membuatnya menjadi kecamatan terluas di kota Surabaya yang termasuk dalam kawasan Surabaya Barat bersama dengan 7 kecamatan lainnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, jika dibandingkan dengan lokasi yang berada tidak jauh dengan pusat Kota Surabaya, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalsari dinilai cukup baik, walaupun memang berada di dekat wilayah perbatasan tidak menyurutkan semangat untuk membangun di wilayahnya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>mengakses. Dari hasil yang didapatkan bahwa sistem ini berpengaruh positif dan memberikan berbagai kemudahan yang dirasakan oleh penggunanya, dan memberikan dampak positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan <i>e-musrenbang</i>. Masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam menggunakan <i>e-musrenbang</i>.</p> |
| 3. | <p>Ali Muldi, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Dakwah Risalah Vol. 29 No. 2 Desember 2018 dengan judul Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis <i>e-Musrenbang</i> (Studi Kasus RKPDP Jawa Barat Online)</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang <i>e-Musrenbang</i> yang merupakan portal yang berbasis <i>website</i> yang diperuntukkan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat. RKPDPJabar ini merupakan sebuah inovasi dalam bidang pelayanan sistem informasi publik dari pemerintah Jawa Barat. Selain berisikan tentang hasil dari Musrenbang, dalam RKPDPJabar juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan usul dan masukan perencanaan pembangunan secara langsung pada <i>stakeholder</i> terkait. Dengan memanfaatkan jaringan internet komunikasi dibangun. Dengan menggunakan RKPDPJabar ini mendorong proses komunikasi perencanaan secara <i>bottom up</i> bukan hanya untuk mentransformasi ide dan gagasan namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat. dengan begitu mendorong <i>stakeholder</i> agar menekan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik terhadap lingkungan sekitarnya. Namun <i>feedbcak</i> tidak terjadi secara langsung melainkan <i>delayed</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | mengatakan bahwa penggunaan sistem <i>online</i> dirasa sangat membantu kinerja kelurahan hingga lebih efektif dan efisien dibandingkan secara manual. Sehingga perlu adanya pendampingan atau <i>workshop</i> penggunaan <i>e-musrenbang</i> khususnya untuk masyarakat. |
| 5. | Novy Setia Yunas, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang Jawa Timur Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1) April 2017, 19-27. Dengan judul Efektivitas <i>e-Musrenbang</i> di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. | Penelitian ini membahas dan menganalisa tentang keberadaan <i>e-musrenbang</i> sebagai sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pemakaian <i>e-musrenbang</i> dapat mendorong partisipasi dan akurabilitas atau usulan yang masuk dari masyarakat. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pembangunan. Dilain hal, keberadaan <i>e-musrenbang</i> dinilai mampu untuk memotong proses yang panjang tentang penjarangan usulan pembangunan yang ada di masyarakat agar usulan tersebut lebih tepat, terarah dan akurat. |

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa beberapa pemerintah daerah sudah mulai menerapkan *e-govrernment* untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan dari masyarakatnya sendiri terkait dengan adanya penggunaan teknologi dalam perencanaan pembangunan, adanya rasa

takut bahwa suatu saat posisi para pegawai pemerintahan akan digantikan oleh teknologi canggih sehingga mereka kehilangan pekerjaannya, sumber daya manusia yang rendah terlebih di negara berkembang seperti Indonesia dimana angka melek teknologi masih dirasa rendah terlebih orang – orang yang menjadi *opinio leader* merupakan mereka yang sudah berusia lanjut sehingga sulit untuk mengoperasikan teknologi. Di lain hal adanya usulan yang tidak terealisasi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek dari yang diteliti merupakan forum musyawarah rencana pembangunan berbasis IT di beberapa daerah dengan menggunakan media website untuk sebagai media penampung aspirasi dan usulan dari masyarakatnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini berupaya untuk memperlihatkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan usulan program diwilayahnya.

partisipasi memungkinkan rakyat untuk mengorganisasikan diri, dengan begitu akan memudahkan masyarakat dalam menghadapi situasi yang sulit dan menolak atas hal yang dianggap merugikan mereka, partisipasi juga sebagai garansi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat, selain itu dengan adanya partisipasi segala permasalahan dalam pembangunan dapat diselesaikan. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi program pembangunan.⁵¹

Dalam perencanaan pembangunan disuatu wilayah, partisipasi menjanjikan sebuah proses yang bersifat kolaborasi, dimana masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, menciptakan ruang dimana mereka dapat mengekspresikan keinginan mereka.⁵²

Dalam sebuah perencanaan pembangunan partisipasi dari masyarakat mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya partisipasi maka masyarakat hanyalah sebagai objek. Sehingga masyarakat menjadi acuh terhadap program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat setempatlah yang paling paham terkait keadaan wilayahnya, dengan bermodal pengetahuan tentang wilayahnya dan pengalamannya sehingga menjadi modal besar dalam melaksanakan

⁵¹ Irma Purnamasari, *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Tahun 2008. Hal. 24

⁵² Lawrence, *Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity Building*. (London:VA. Earhscan, 2000) hal. 166

Peta Konsep Penelitian

Dari bagan tersebut dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari penerapan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kota Surabaya dengan nama E-Musrenbang. E-Musrenbang merupakan wujud pelaksanaan E-Government dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan E-Government salah satu komponen yang mendukung adalah adanya keterlibatan atau partisipasi dari publik. Peran keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaannya, apa permasalahan yang dihadapi dan mereka yang paham potensi apa yang mereka miliki. Dengan menggunakan teori tangga partisipasi Sherry R. Arnstein yang mengklasifikasi partisipasi kedalam delapan anak tangga berdasarkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dan seberapa besar masyarakat diberi ruang untuk dapat menyuarakan aspirasinya, serta kedudukan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, hingga pejabat di Pemerintahan baik Kelurahan maupun Bappeko Kota Surabaya diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari berada pada kedudukan *Delegated of Power* atau pendelegasian kekuasaan, hal tersebut ditandai dengan adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya

pengetahuan, konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, selain itu juga dapat menemukan jawaban melalui penelitian yang sudah dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tema partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang. Dimana penerapan e-musrenbang ini sudah lama dilakukan yang dimulai dari tahun 2009, walaupun sudah mengadopsi perkembangan teknologi, tetapi tidak menutup cela bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi dan mengorbankan kepentingan masyarakat bersama. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan ITS Surabaya mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan musrenbang di wilayah Surabaya bagian barat merupakan terendah dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya. Kelurahan Romokalisari berada di Kecamatan Benowo yang masuk dalam kawasan Surabaya Barat.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah melakukan pemilihan topik dan melakukan analisis terkait permasalahan yang diteliti, selanjutnya adalah menentukan metodologi yang hendak digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menjawab dengan tepat dan terandalkan keahliannya. Dalam tahap ini, perlu kiranya untuk menentukan 1) jenis penelitian yang akan

digunakan, 2) metode, sumber dan alat pengumpulan data dan 3) strategi analisis data.

Setelah pengkajian pokok permasalahan, selanjutnya peneliti menentukan metodologi penelitian dengan memilih jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan strategi analisis data miles dan huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi yang menurut peneliti format tersebut relevan dengan fenomena yang ada dilapangan.

3. Pengumpulan Data

Setelah melakukan penyusunan desain dan instrumen penelitian, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini peneliti mewawancarai informan yang menjadi sumber data penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan 8 informan yang terdiri dari, dua pegawai kelurahan, lima dari masyarakat dan satu orang dari Bappeko Surabaya yang terlibat dalam pelaksanaan e-musrenbang. Selain itu pengamatan juga dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan yang ada di lapangan.

4. Pengelolaan, Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau *data processing*. Dimana pengolahan data meliputi kegiatan berupa *edditng data*. *Edditing data* merupakan kegiatan pemeriksaan data yang sudah terkumpul, apakah data sudah terisi sempurna atau belum, sudah lengkap atau belum dan apakah cara pengisiannya sudah benar atau belum, apabila terdapat data yang belum lengkap maka data dapat disisihkan dan diperlukan untuk disempurnakan lagi dengan cara melakukan data ulang ke sumber data yang bersangkutan.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Pada bagian ini, peneliti mengkomunikasikan tentang apa yang telah diteliti, bagaimana cara penelitiannya, dan hasil penelitian yang ditemukan. Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan dalam laporan tentang (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi yang digunakan, dan (3) hasil dari penelitian yang ditemukan.

Proses penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti selama 6 (enam) bulan dengan melakukan pengamatan dilapangan. Dalam laporan penelitian ini peneliti pengkaitkan dan menyatukan masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang dengan metode yang telah dijelaskan dan hasil temuan dilapangan.

dalam perencanaan sudah cukup baik untuk daerah yang terletak berada di wilayah perbatasan dengan daerah lain. Masyarakat bersedia untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam forum musrenbang baik tingkat RT / RW maupun tingkatan selanjutnya. Hanya saja dalam hal mengawalan usulan mereka hanya memasrakan kepada Ketua RW padahal mereka dapat melakukannya sendiri dirumah dengan memanfaatkan jaringan *wifi* gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti kepada informan, dengan menggunakan metode *face to face* untuk bisa mendengarkan, mengamati dan memahami keterangan yang diberikan oleh pihak yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat, pegawai Kelurahan Romokalisari dan Staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya untuk memperoleh informasi terkait partisipasi masyarakat dan pelaksanaan e-musrenbang yang ada di Kelurahan Romokalisari serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya e-musrenbang dalam bagian dari perencanaan pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Demi mendukung wawancara peneliti menggunakan alat bantu *voice recorder* untuk merekam hasil wawancara. Sedangkan informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan orang yang mempunyai informasi yang mendalam terkait dengan pelaksanaan e-

pemerintah dengan aspirasi prioritas oleh masyarakat lokal.¹²⁶ Hal tersebut juga diterapkan dalam sistem perencanaan Kota Surabaya, selain usulan yang berasal dari masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai program sendiri yakni pemberian makan bagi warga yang berkebutuhan khusus dan lansia terlantar. Tujuannya adalah agar masyarakat Surabaya dapat terpenuhi gizinya dan masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus juga dapat hidup layak. Pelaksanaan program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada, dalam hal ini Kelurahan merupakan pelapor atas pelaksanaan program kepada Pemerintah Kota Surabaya.¹²⁷

Tahun 2020 ini, pelaksanaan program mengalami penundaan akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda Kota Surabaya. Sehingga menyebabkan tahun ini belum ada program pembangunan yang dilaksanakan, termasuk dalam hal pemberian pelatihan kepada petugas Kelurahan terkait mekanisme pelaksanaan lelang.

Walaupun dengan adanya E-Musrenbang ini diharapkan dapat memberikan transparansi terkait usulan program yang masuk hingga program yang disahkan, namun dalam halaman website e-

¹²⁶ Ahmad Mustanir, Partisan Abdi, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik, Vol 5 No. 2 Tahun 2017 hal. 248

¹²⁷Ibu Nina Anggreini, ST – Staff Bappeko Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020 pukul 10.02 WIB

| | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| | | pemerintah. Walaupun usulan mereka tidak dihiraukan oleh Pemerintah. |
| Peredam kemarahan | | Adanya proses tawar menawar atau negosiasi program pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat dalam forum Musrenbang. |
| Kemitraan | Kekuasaan masyarakat | Kondisi dimana kedudukan masyarakat dan pemerintah sejajar, masyarakat mempunyai ruang dalam sebuah program. Mereka berinisiatif untuk hadir setelah adanya kesepakatan antara keduanya yang dilandasi dengan rasa sukarela. |
| Pendelegasian kekuasaan | | Pemerintah memberikan wewenangnya kepada masyarakat guna mengurus sendiri kebutuhan dan kepentingannya. Pemerintah mempercayakan perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Mereka berinisiatif untuk hadir karena telah mempunyai wewenang dalam membuat keputusan. |
| Pengawasan masyarakat | | Masyarakat terlibat aktif dalam perumusan masalah, implementasi, kontrol dan evaluasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka berinisiatif hadir karena telah mempunyai kekuasaan penuh dalam pembangunan. |

Berdasarkan hasil penyajian data dan setelah melakukan wawancara terkait dengan partisipasi masyarakat maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalisari berada pada tingkatan *delegated of power* atau pendelegasian kekuasaan dan masuk dalam kategori *citizen control*. Berikut adalah penjelasan terkait dengan tangga *delegated of power* :

proses pengidentifikasian permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan usulan dalam forum rembuk untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Ketua RT dan Ketua RW. Dengan begitu, usulan – usulan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan yang ada dapat tepat sasaran.

Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pada level selanjutnya ditemui usulan yang tidak sesuai ketentuan, maka usulan tersebut akan gugur otomatis dan akan digantikan dengan usulan cadangan yang telah disiapkan sebelumnya dalam mengubah usulan yang telah gugur dengan usulan cadangan masih dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat, sehingga masyarakat punya andil besar dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat masih berlanjut hingga Musrenbang tingkat Kota.

Pada tingkatan pendelegasian kekuasaan ini, inisiasi sudah dimulai dari masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian hingga pada tahap evaluasi dan penikmatan hasil pembangunan. Walaupun memang dalam proses perencanaan tidak semua warga terlibat hanya sebagian perwakilan saja yang terlibat, namun dari perwakilan tersebut suara masyarakat akan disampaikan. Dalam hal pelaksanaan dan penikmatan hasil pembangunan merupakan kewajiban dan hak setiap individu. Selain pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan program yang telah disepakati, pemerintah menyerahkan pelaksanaannya pada masyarakat. Seperti contoh program permukiman yang merupakan program

Pemkot untuk memberi makan kepada warganya yang mempunyai kebutuhan khusus dan lansia Pemkot menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan program kepada masyarakat melalui LSM yang ada seperti Karang Werdah dan IPSM. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat sehingga masyarakat juga merasa ikut memiliki program tersebut.

Selain itu, dengan adanya peraturan tentang Dana Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Pusat guna mendukung pembangunan yang ada di Kelurahan serta dilimpahkannya pelaksanaan lelang proyek pembangunan kepada Kelurahan sehingga dapat menjadikan Kelurahan sebagai pusat pembangunan, dimana Kelurahan merupakan unit pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan memudahkan masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait pembangunan di wilayahnya. Adapun syarat pelaksanaan lelang adalah apabila terdapat program pembangunan yang menghabiskan anggaran Rp 200.000.000 atau lebih, biasanya adalah untuk pembangunan fisik berupa perbaikan jalan, pemavingan maupun pembuatan saluran air.

Dengan adanya pendelegasian kekuasaan ini artinya pemerintah telah memberikan wewenangnya pada masyarakat untuk mengurus sendiri kebutuhannya yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan akhirnya penikmatan pembangunan. Masyarakat memegang kartu penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayahnya. Mereka mempunyai kekuasaan yang jelas serta tanggung jawab penuh

terhadap keberhasilan program pembangunan. Pada tangga *delegated of power* masuk kedalam kelompok *citizen power* dimana pada kelompok ini terdapat keterlibatan dari masyarakat sipil sebagai salah satu bagian penting dalam menggerakkan masyarakat. Adanya pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal pembangunan, baik berupa fisik maupun pembangunan manusianya. Sedangkan masyarakat berhak atas kehidupan yang layak dan menikmati hasil pembangunan yang ada. Selain hak dan kewajiban, adanya pembagian wewenang dimana masyarakat diberi wewenang guna membuat keputusan terkait sebuah perencanaan dan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang terbebas dari tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Sehingga masyarakat mempunyai kendali penuh atas keputusan yang dibuat bersama dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Romokalisari dapat dikatakan hampir maksimal apabila masyarakat ikut serta dalam mengontrol usulan mereka. Adanya E-Musrenbang merupakan salah satu bentuk pemberian transparansi kepada masyarakat. Walaupun begitu, transparansi yang diberikan hanya sebatas usulan kegiatan, tidak dicantumkan kolom anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan.

- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government di Indonesia.
- Kadir, Abdul, Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Otonomi Daerah. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau* Vol. 1 No. 2 Desember 2005.
- Kamahuddin, Rustian, Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.
- Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
- Kumorotomo, W. Erika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992
- Lawrence, Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity Building. London: VA. Earhscan, 2000.
- Mikkelsen, BIRTHA, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Miraza, Bachtiar Hassan, Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau* Vol. 1 No. 2 Desember 2005.
- Mubiyarto, Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM, 1984.
- Mustanir, Ahmad, Partisan Abdi, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, Vol 5 No. 2 Tahun 2017
- Ndraha Talizidhuhu, Pembangunan Masyarakat Desa (Jakarta : Rireba Cipta) 1983
- Noveriyanto, Baharuddin, Laila Chairun Nisa, Achmad Sofian Bahtiar, E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya, Studi Kematangan E-Goverment Sebagai Layanan Komunikasi G2G, G2C and G2B. *Jurnal Profetik Komunikasi* vol. 11/no. 01/April 2018.
- Paselle, Enos, Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma* Vol. 2 No. 1 April 2013.
- Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.
- Purnamasari, Irma, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik tahun 2008.
- Rahmawati, Nur, Rudi Saprudin & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share Social Work Journal*, Vol. 5 No. 1.
- Reny Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Riyadi dan Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rowe, Gene and Lynn J. Frewer, Evaluating Public-Participation Exercises: A Research Agenda *Science, Technology and Human Values*, Vol. 29 No. 4.
- Rukminto, Adi Isbandi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi. Komunitas, Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI, 2001.
- Satries, Wahyu Ishadino, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan*, Vol. 2 No. 2 September 2011
- Setyasa, Prima Tama, Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya. *Jurnal Penata Ruang* Vol. 14 No. 1 Tahun 2019.
- Soemarno, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Tjokrowinoto, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Cipnuy, 1993.
- Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wasistiono, Sadu, Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia, 2007.

